BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Perusahaan

Periode sebelum Kemerdekaan, awal kelistrikan dimulai pada akhir abad ke 19. Pada saat itu beberapa perusahaan Belanda menyediakan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Sedangkan kelistrikan untuk pemanfaatan umum dimulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGM Jakarta yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya dibidang kelistrikan umum, hal ini diundang-undangkan dalam ordonansi 1890 No. 190 tanggal 13 September 1890. Selanjutnya pemerintah Belanda berdasarkan Staatblad 1927 No. 419 mendirikan Land Waterkracht Bedrijven (LWB) yaiu perusahaan listrik yang mengelola pembangkit tenaga air dan teaga uap. Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, dengan demikian perusahaan listrik dan gas diambil alih oleh pemerintah Jepang. Perusahaan listrik tersebut oleh pemerintah Jepang diberi nama Denki Jyosha. Bersamaan dengan jatuhnya pemerintah Jepang ketangan sekutu, secara serentak buruh dan pemuda-pemuda Indonesia menganbil alih perusahaan listrik.

Periode 1945-1950

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan pemerintah Jepang, kemudian pada bulan September 1945 diserahkan kepada pemerintah RI dan diberi nama jawawtan listrik dan gas. Selanjutnya dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1 tanggal 27 Oktober 1945 maka jawatan listrik dan gas dimasukkan pada

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Denhgan adanya agresi Belanda 1 perusahaan listrik kembali dikuasai kembali oleh pemiliknya semula. Kemudian agresi Belanda II tanggal 19 Desember 1948, sebagian jawatan listrik dan gas direbut Belanda. Selama masa kependudukan sampai waktu penarikan kembali tentara Belanda, jawatan listrik dan gas kembali ke Yogyaarta. Kemudian dengan pindahnya pusat pemerintah RI dari Yogyakarta ke Jakarta, jawatan listrik dan gas pindah ke Jakarta. Sesuai dengan perkembangannya jawatan listrik dan gas menjadi listrik pada tahun 1950.

Periode 1951-1966

Jawatan Listrik dan Gas membawahi Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik (PENUPETEL) kemudian diperluas membawahi Perusahaan Negara untuk Distribusi Tenaga Listrik (PENUDITEL). Perjuangan pemerintah Indonesia untuk menasionalisasikan perusahhan listrik dan gas swasta dengan dikeluarkannya keputusan Presiden RI No. 163 tanggal 3 Oktober 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda kembali kepada pemerintah Indonesia.

Periode 1967-1985

Berdasarkan SK Mentri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja No. f25/45/17 tanggal 23 September 1958 jawatan tenaga diubah menjadi Perusahaan Listrik Negara. Pada tahun 1972 terbit Peratyran Pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang memberikan tugas pemerintah dibidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugasnya sebagai perusahaan. Dalam kabinet pembangunan III yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No.

15 tahun 1978 tanggal 29 Maret 1978 Departemen Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan dan Energi sehingga pelaksanaan tugas dibidang energi termasuk listrik ada dibawah lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.

2. Berdirinya Perum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat

Semula PLN Distribusi Jawa Barat bernama GEBEO yang merupakan nama pihak pemerintah Belanda dan pada tahun 1967 diganti dengan nama Perusahaan Umum Listrik Negara Exploitasi. Tugasnya adalah melaksanakan/mengusahakan Distribusi III yang mempunyai wilayah kerja diseluruh Jawa Barat kecuali tanggerang. PLN Jawa Barat meliputi daerah Banten, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Cimahi, Bandung, Majalaya, Cirebon dan berkantor pusat di kantor Distribusi Jawa Barat Bandung. Pada tahun 1975 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 08/PRT/1975 tentang organisasi tata kerja Perum Listrik Negara mengadakan reorganisasi yang menyangkut nama, tujuan dan wilayah kerja Perum Listrik Negara di daerah. Setelah Indonesia secara berangsur-angsur merdeka pada tahun 1960, dilakukan proses pemindahan atau rasionalisasi dari GEBEO menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang dimonopoli oleh pemerintah RI berdasarkan UUD 1945 pasal 33 berdasarkan SK Presiden RI No. 18 tahun 1972 yang memiliki tujuan untuk membangun ekonomi dan ketahanan nasional dibidang kelistrikan untuk mempertinggi derajat masyarakat Indonesia. Berikut peristiwa kelistrikan di Jawa Barat :

1. Masa Pemerintah Hindia-Belanda

Pada tahun 1905 berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu Bandoeng

Elektricitiet Maatschappij (BEM) yang memiliki tugas membuat atau membangun jaringan listrik di Bandung dan sekitarnya. Pada tahun 1919 berdiri Land Waterkracht Bedrijven (LWB) yang tugasnya bergerak dibidang penguasaan pembangkit dan penyaluran tenaga listrik yang mempunyai wilayah kerja diseluruh Indonesia. Tahun 1919 dibuat akte pendirian perusahaan pelistrikan dihadapan Notaris MR. Adrian Hendrik dan Ophser di Batavia dengan nomor akta No. 213 tanggal 31 Desember 1919 yaitu pendirian perusahaan perseroan Gemeenschappelijk Elekctriciteit Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO) pada tanggal 1 Januari 1920 yang menggantikan BEM.

2. **Masa Pemerintahan Jepang.**

Pada masa ini, pendistribusian tenaga listrik diusahakan oleh Djawa Denki Djiyo Sha Sa dengan wilayah kerja diseluruh pulau jawa.sedangkan usaha pembangkitan dan penyalurannya dilakukan oleh instansi, yaitu:

- Shal Boe Denki Djigsha pada periode 1942-1945.
- Dengki Kisha pada periode 1943-1945.

3. Masa Perjuangan Fisik

Setelah kemerdekaan 1945-1948, pada masa revolusi perjuangan fisik pelistrikan di Indonesia khususnya Jawa Barat dilaksanakan oleh RI dengan nama Jawatan Listrik.

4. Masa Agresi Militer Belanda

Tahun 1048 Belanda masuk pada pemerintahan RI untuk pindah ke Yogyakarta. Pengusahaan dan pendistribusian tenaga kerja listrik khususnya Jawa Barat termasuk Jakarta diusahakan oleh GEBEO sedangkan pembangkitan dan penyebarannya tetap

dikuasai oleh pemerintah RI yaitu Perusahaan Negara Untuk Pembangkitan Listrik (PERU PETEL).

5. **Masa NAsionalisasi dan sesudahnya.**

Tahun 1957 terjadi nasionalisasi perusahaan milik asing, maka GEBEO diambil alih pada tanggal 27 Desember 1957. tahun 1958 dikeluarkan PP No. 86 Tahun 1958 pengganti UU No.19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Tahun 1959 berdasarkan PP No. 18, GEBEO di Bandung dinyatakan menjadi Perusahaan Milik Negara dengan nama PLN. Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Umum Listrik Negara yang disingkat BPU PLN.

Pada tahun 1965 berdasarkan PP No. 10 Tahun 1965 dan Peraturan Mentri PU dan Tata Kerja No. 1/PRT/65 diadakan reorganisasi dimana BPU PLN dihapus. Di tingkat daerah dibentuk susunan organisasi PLN yang disebut Perusahaan Listrik Negara Exploitasi XI berkedudukan di Bandung termasuk cabangnya. Tahun 1972 didalam PP No. 18 Tahun 1972 tentang Perum Listrik Negara dalam Bab I Pasal 1 Ayat 1& 2, disebutkan hal-hal yang menyangkut status PLN yang baru yaitu PP No. 54 tahun !(81 tentang Perusahaan Listrik Negara.

Sasaran akhir Perusahaan Umum Listrik Negara yaitu: Penyediaan dan Pelayanan tenaga listrik bagi kepentingan umum secara terus menerus dan merata diseluruh wilayah hokum RI dengan keandalan mutu, keselamatan dan harga yang terjangkau masyarakat (pasal 4 Keputusan Mentri Pertambangan dan Energi No. 449/K/12 MPE 1985 tanggal 10 Mei 1985).

Tujuan PLN yaitu: Ikut serta membantu dan menetapkan ketahanan nasional di wilayah kerjanya menurut kebijaksanaan Direksi PLN dalam penyediaan tenaga listrik.

Di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1994 ditetapkan tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Milik Negara menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PERSERO) berdasarkan:

1. PP RI No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
2. SK MenKeu RI tanggal 28 Juni 1994 No. 317/KMK.016/1994 tentang penetapan modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Listrik Negara.
3. Surat MenKeu RI tanggal 28 Juni 1994 No. 353/MK/1994.
4. Keputusan Mentri Kehakiman RI No. C2-11.519.HT.01.01-TH'94.

Keputusan Mentri Kehakiman RI tentang ditetapkannya Perseroan Terbatas bagi PLN telah dituangkan kedalam lembaran Negara pada tambahan Berita Negara RI menurut pasal 38 dari buku UU perniagaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuk Perusahaan Umum Listrik Negara dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai Akte pendiriannya.

Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Bogor yang berlokasi di Jln Kapten Muslihat No. 2-4 dipugar pada tahun 1981 dan diresmikan oleh Prof.Ir.Suryono pada tanggal 26 Juni 1982.